2024

RENCANA STRATEGIS

(Renstra)

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

KATA PENGANTAR

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindak lanjuti amanat tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 guna mendukung daya saing ekonomi di Sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah khususnya di Sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Pemerintah Kota Samarinda Yaitu **"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"** yang dituangkan dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026, yang merupakan pedoman dalam melaksanakan bidang urusan guna mewujudkan pembangunan sektor koperasi, usaha kecil menengah dan industri sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang berdaya saing, maju dan mandiri, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

Renstra ini diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama seluruh stakeholder hingga selesainya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 ini diucapkan banyak terima kasih.

Samarinda, 1 Juli 2023
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda

Nurrahmani, SIP, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903011990032003

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR LAMPIRAN vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 8
2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda 8
2.2. Gambaran Tugas dan Fungsi 11
2.3. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda 11
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda 13
2.5. Tantangan dan Peluang 25
BAB 3 ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda 28
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 29
3.3 Telaahan RENSTRA Kementrian Perindustrian 33
3.4 Telaahan Pengarusutamaan Gender (PUG) 36
3.5 Isu - isu Strategis 37
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 39
4.1 Visi dan Misi Pemerintah Kota Samarinda 39
4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda 43
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 44
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda 44
BAB 6 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 47
6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif 47

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 74
7.1. Indikator Kinerja 74
BAB 8 PENUTUP 81

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda	31
Grafik 2.1	Jumlah PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berdasarkan pendidikan Desember 2020	34

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan PNS/Honorer	33
Tabel 2.2	Jumlah pegawai berdasarkan bidang sesuai jabatan	35
Tabel 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan bidang sesuai jabatan / esselon	36
Tabel 2.4	Jumlah pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) berdasarkan bidang laki - laki atau perempuan	37
Tabel 2.5	Jumlah pegawai tidak tetap harian (PTTH) berdasarkan bidang laki - laki atau perempuan	38
Tabel 2.6	Distribusi pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	39
Tabel 2.7	Distribusi pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	41
Tabel 2.8	Distribusi pegawai tidak tetap harian (PTTH) berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin	42
Tabel 2.9	Daftar pegawai yang pernah mengikuti Diklat / Pelatihan	43
Tabel 2.10	Analisis Jabatan	44
Tabel 2.11	Kondisi sarana kerja Dinas Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2020	46
Tabel 2.12	Sarana prasarana Tahun 2020	47
Tabel 2.13	Belanja langsung dan tidak langsung Disperin Kota Samarinda Tahun 2016 - 2020	47
Tabel 2.14	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kota Samarinda	48
Tabel 2.15	Nilai PDRB sektor Industri pengolahan Kota Samarinda Tahun 2015 - 2019	49
Tabel 2.16	Produk unggulan Industri Kota Samarinda berdasarkan kecamatan	49
Tabel 2.17	Target dan realisasi capaian kinerja bidang Industri tahun 2016 - 2020 Kota Samarinda	51
Tabel 2.18	Data Capaian kinerja Disperindag Kota Samarinda tahun 2016 - 2020	53
Tabel 2.19	Data pagu anggaran dan realisasi Anggaran Disperindag Kota Samarinda	60
Tabel 3.1	Nlai skala kriteria berdasarkan Isu strategis	82
Tabel 6.1	Rencana program berdasarkan strategi Dinas Perindustrian Kota Samarinda	87
Tabel 6.2	Rencana program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perindustrian Kota Samarinda (Program Kegiatan Teknis)	100
Tabel 6.3	Rencana program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Perindustrian Kota Samarinda (Program Kegiatan Non Teknis)	105
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perindustrian	117

LAMPIRAN

- Matrik RENSTRA Dinas Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026
- Tabel Program Kegiatan yang mengacu kepada RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
Jl. Ir. H. Juanda No.81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113699
SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR
Website : www.diskukmp.samarindakota.go.id Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800/ 32 /SK-P.RENSTRA/100.14

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 97 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Koperasi, UKM dan Kota Samarinda.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Per Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan I Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5492);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Tentang Standar Pelayana (khusus OPD SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuar Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiar Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones 4737).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi F Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, T Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tah Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tal Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Permendagri No. 86 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Pere Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefik Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Tentang Peraturan Pelaksanaan I Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Tentang Tentang Hasil Veri Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Per Pembangunan dan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2001 tanggal 23 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Sam
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 tanggal 14 Okto tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organis Daerah Kota Samarinda;
18. Perda Nomor 4 Tahun 2015, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarin 2021-2026;
20. Perda Nomor 3 Tahun 2016, Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Y Menjadi Kewenangan Daerah
21. Perda Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Peran Daerah
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tunas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Kedua : Perubahn Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagaimana dictum pertama keputusan ini merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan.

Ketiga : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Keempat : Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 1 Juli 2023
Kepala,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
10

Nurrahmani, SIP, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903011990032003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan Renstra SKPD ini sendiri sejalan dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan aturan / pelaksanaannya dimana Renstra SKPD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. dan global dalam tatanan system manajemen pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

13 Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17 Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

19 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Samarinda;

20 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah dokumen perencanaan pembangunan Koperasi dan UKM periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian adalah:

1. Mengetahui kinerja Dinas Koperasi dan UKM dimasa lalu, permasalahan dan isu strategis, sasaran strategis dan bagaimana upaya pencapaiannya dalam lima tahun mendatang;
2. Memandu perencanaan pembangunan perkoperasian dan ukm yang berkelanjutan;
3. Sebagai instrumen bagi pihak-pihak yang bertugas melaksanakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi program dan kegiatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD setiap tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L

dan Renstra provinsi /kabupaten / kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan peragkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penggangaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Tugas dan Fungsi

Memuat penjelasan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

2.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA DAN PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah adapun turunannya ialah Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan kewenangan konkruen daerah kota samarinda dan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta dijabarkan melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda ditunjang dengan rincian Susunan Organisasi SKPD berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 113 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretaris membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Keuangan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
   - Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).

8. UPTD.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022

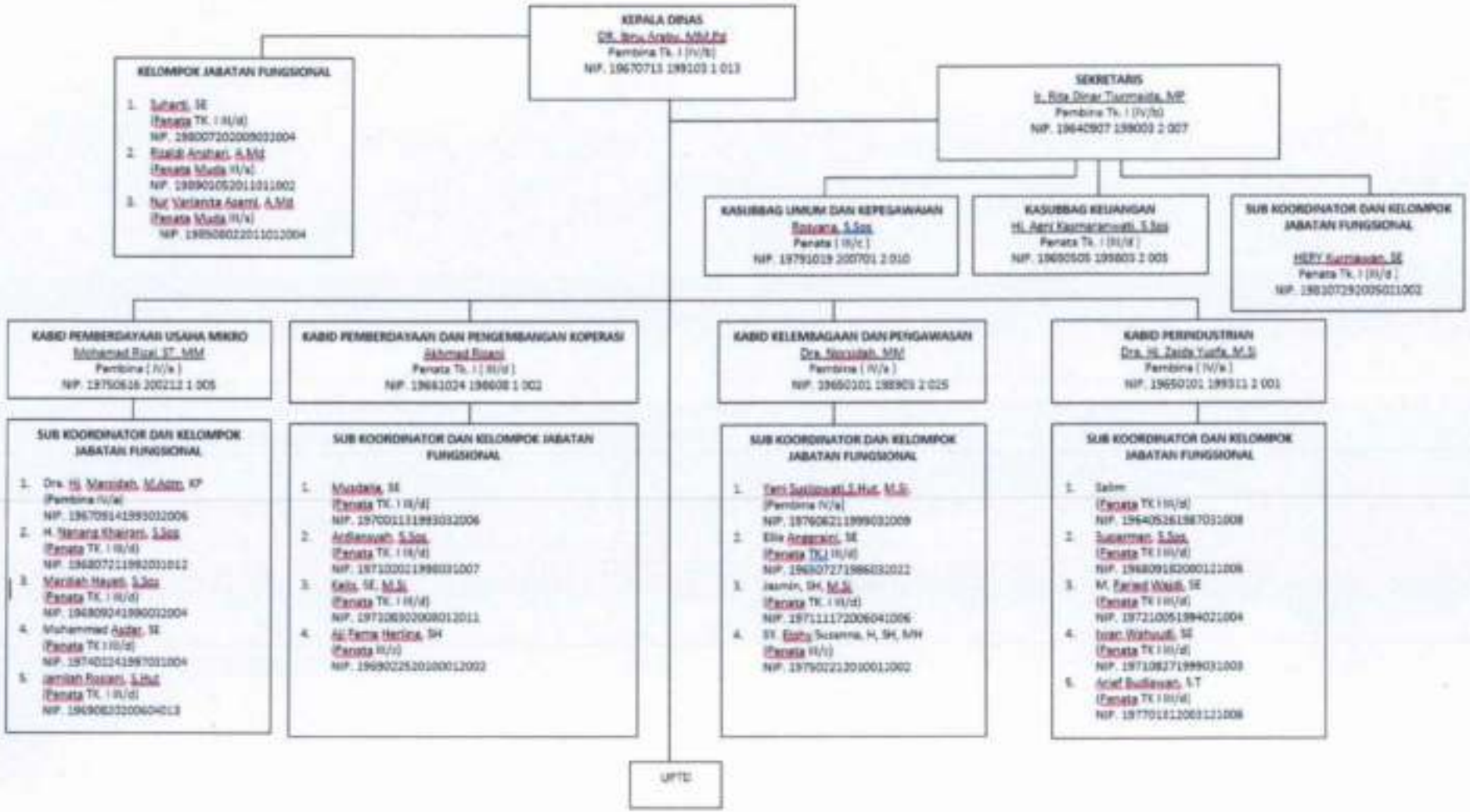

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor : 113 Tahun 2021, tugas pokok Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan, serta Bidang Perindustrian

b. Fungsi

Dalam menyelanggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

1. Sumber Daya Pegawai

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda per 31 Desember 2021 memiliki sumber daya manusia sebanyak 109 (Seratus Sembilan) orang yang terdiri atas 8 (Delapan) orang pejabat struktural, 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Fungsional, 40 (Empat puluh) orang pegawai non struktural, dan 38 (tiga Puluh delapan) orang tenaga Pegawai Tidak Tetap Bulanan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	PNS	48	1. Eselon : II 1 Orang III 5 Orang 2. Golongan : I 1 Orang II 19 Orang III 44 Orang IV 7 Orang 3. Pendidikan : SD Sederajat 1 Orang SMP Sederajat 0 Orang SLTA Sederajat 25 Orang Diploma Sederajat 3 Orang S1 Sederajat 32 Orang S2 Sederajat 9 Orang S3 Sederajat 1 Orang
2	PTTB/PTTH	38	-
3	Jabatan Fungsional	23	-
Jumlah		**109**	**Orang**

2. Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindusstrian Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa Kendaraan Dinas, Komputer, Laptop, Barang Inventaris, dan Fasilitas Kantor lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagaian besar dalam kondisi baik, dan diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/profram yang tercapai. Berikut ini adalah anggaran PAGU

untuk tahun 2021 APBD Kota Samarinda untuk dijadikan gambaran dalam menyusun PAGU Anggaran tahun 2022 APBD Kota Samarinda

a. Sumber Dana APBD 2016 s/d 2020

Perkembangan pagu indikatif anggaran dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2016 pagu anggaran sebesar Rp. 5.940.341.505,- dengan realisasi sebesar 98,86%, pada tahun 2017 sebesar Rp. 7.168.985.361,- dengan realisasi 93,04%, tahun 2018 Rp. 8.070.532.628,- dengan realisasi sebesar 91,72%, tahun 2019 sebesar Rp. 8.878.811.234,- mencapai 93,66%, tahun 2020 sebesar Rp. 7.947.297.418,- dengan realisasi mencapai 95,45%. Pada tahun 2020 pagu anggaran mengalami revisi defisit anggaran karena rasionalisasi penerimaan pendapatan daerah, dan penanggulangan bencana nasional covid 19.

Pagu Dana indikatif selama 5 tahun pada tabel berikut :

Tabel 2.2

NO.	JENIS BELANJA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Belanja Tidak Langsung	5.132.695.966	6.019.804.091	7.000.582.357	7.223.064.692	5.448.267.791
2.	Belanja Langsung	807.645.539	1.149.181.270	1.069.950.271	1.823.587.542	2.499.029.627
JUMLAH		**5.940.341.505**	**7.168.985.361**	**8.070.532.628**	**8.878.811.234**	**7.947.297.418**

2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

1. Sektor Koperasi dan UKM

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UKM, perkembangan jumlah koperasi di Samarinda selama periode 2016 – 2020 mengalami pertumbuhan positif, ada koperasi yang dibubarkan dan pembentukan koperasi baru, koperasi yang tidak

aktif diberikan pembinaan agar menjadi aktif atau beraktivitas sedangkan koperasi yang benar-benar tidak aktif dan tidak dapat dibina dikarenakan kepengurusan secara de vacto sudah tidak ada walaupun secara yuridis masih terdaftar secara badan hukum. Pada 2016 Jumlah Koperasi sebanyak 1.220 unit dan berubah menjadi 1.059 pada 2021, terkoreksi koperasi diusulkan bubar sebanyak 325 koperasi.

Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam tabel :

Tabel 2.3

Tabel Koperasi Aktif dan Tidak Aktif

Tahun 2016 s/d 2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi aktif	1,220	1.062	986	991	1,059
2	Jumlah koperasi tidak aktif	181	175	189	221	325
3	Persentase Koperasi Aktif	87,08%	85,85%	83,91%	81,76	76.51%
	Jumlah Koperasi	1.401	1.237	1.175	1.212	1.384

Sedangkan jumlah UKM yang telah dibina juga mengalami peningkatan. Pada 2016 jumlah UKM sebanyak 26,280 UKM dan meningkat menjadi 36.847 UKM pada akhir 2020, dengan perbandingan Usaha Kecil sebanyak 32.334 unit dan Usaha Menengah sebanyak 4.413 Unit. Jumlah UKM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tabel Usaha Kecil Menengah

Tahun 2016 s/d 2021

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh UKM	26,280	27,682	28,973	36,747	36,837
2	Jumlah BPR/LKM	0	0	0	0	10
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	26,280	27,682	28,973	36,747	36,847
4	Persentase UKM Aktif	85%	86%	87%	88%	88 %

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 Kota Samarinda, pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda terdapat 2

(dua) indikator RPJMD dimana hingga akhir 2021 belum tercapai pada indikator persentase koperasi aktif sedangkan pada Usaha Mikro dan Kecil dapat tercapai. Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD 2016 – 2021 secara akumulatif pada Dinas Koperasi dan Kota Samarinda :

Tabel 2.5

No.	Indikator	Target RPJMD					Realisasi RPJMD				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Koperasi Aktif	53%	54%	55%	60%	65%	38%	40%	44%	30%	33%
2.	Usaha Mikro dan Kecil	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	13%

2. Sektor Perindustrian

Industri dibagi dalam 4 golongan yaitu Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); dan Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Keadaan industri Kota Samarinda terlihat pada grafik dan tabel dibawah ini

Tabel 2.11
KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2020

NO	TAHUN	PDRB KOTA SAMARINDA (Jutaan Rp)	PDRB SEKTOR INDUSTRI (Jutaan Rp)	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI (%)
1	2016	52.647.368,57	4.398.300,87	8,35
2	2017	58.443.748,70	4.720.877,03	7,87
3	2018	63.564.686,76	5.003.317,50	7,82
4	2019	67.604.540,75	5.217.439,01	7,72
5	2020	66.525.011,43	5.133.070,54	7,72

Tabel 2.12
NILAI PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 – 2020

No	Tahun	PDRB (DALAM JUTA Rp)		LAJU PERTUMBUHAN (%)
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2016	4.398.300,87	3.240.358,32	-0,40
2.	2017	4.720.877,03	3.299.508,24	1,83
3.	2018	5.003.317,50	3.408.879,75	3,11
4.	2019	5.217.439,01	3.554.282,27	4,27
5.	2020	5.133.070,54	3.413.063,00	-3,97

Pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB dari sektor industri Kota Samarinda mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun laju pertumbuhan sektor industri pengolahan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2019. Dengan hal ini, diharapkan untuk tahun-tahun selanjutnya sektor industri pengolahan bisa menjadi fokus pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Saat ini disemua kecamatan di Samarinda mempunyai produk unggulan indsutri, baik industri yang berskala besar maupun industri kecil menengah. Produk unggulan industri di Kota Samarinda berdasarkan kecamatan di Samarinda terlihat pada tabel dibawah ini:

Produk Unggulan Industri Kota Samarinda Bersadarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Produk Unggulan
1	Sungai Kunjang	Kayu Lapis/ Plywood/ Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Industri Kapal Besi/Baja, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum, Kerajinan ukir kayu.
2	Samarinda Ulu	Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum.
3	Samarinda Kota	Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Industri Pandai Besi, Percetakan Umum.

4	Samarinda Ilir	Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Industri Kapal kayu, Percetakan Umum.
5	Sambutan	Industri Kapal Besi/Baja, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Industri Pembuatan Busa.
6	Sungai Pinang	Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum.
7	Samarinda Utara	Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Percetakan Umum, industry kerajinan anyaman rotan/manik.
8	Loa Janan Ilir	Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman.
9	Samarinda Seberang	Industri Kain Sarung Tenun Samarinda, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman.
10	Palaran	Industri Kapal/perahu Besi/Baja, Industri Pengolahan Kayu, Sawmil, Industri Kapal Besi/Baja, Moulding, Industri Las & Bubut, Industri Reparasi Kendaraan Roda Dua / Empat, Ready Mix, Industri Makanan & Minuman, Pengantongan Semen, Industri Pupuk, Bata Ringan.

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Bidang Industri Tahun 2016-2020
Kota Samarinda

No	Indikator kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Capaian (Tahun)									
			2016		2017		2018		2019		2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pertumbuhan IKM	Unit	1.362	1.362	1.406	1.406	1.430	1.430	2.166	2.166	2.372	2.372
2	Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	13.135	13.135	13.505	13.505	13.933	13.933	15.115	15.115	16.626	16.626
3	Pertumbuhan Investasi IKM	Rp (juta)	375.124.256.680	375.124.256.680	450.504.056.680	450.504.056.680	587.624.713.291	587.624.713.291	602.025.013.292	602.025.013.292	606.756.250.292	606.756.250.292
Industri Agro												
a) Pertumbuhan Unit Usaha		Unit	272	272	289	289	295	295	346	346	397	397
b) Pertumbuhan Tenaga Kerja		Orang	2.485	2.485	2.510	2.510	2.676	2.676	2.740	2.740	3.116	3.116
c) Pertumbuhan Investasi		Rp (juta)	31.714.663.550	31.714.663.550	32.214.663.550	32.214.663.550	36.563.688.550	36.563.688.550	30.058.688.550	30.058.688.550	38.981.225.550	38.981.225.550
Industri Aneka												
d) Pertumbuhan Unit Usaha		Unit	55	55	55	55	56	56	280	280	332	332

e) Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	723	723	723	723	733	733	1.015	1.015	1.393	1.393
f) Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	1.505.860.350	1.505.860.350	1.505.860.350	1.505.860.350	1.755.860.350	1.755.860.350	3.289.160.350	3.289.160.350	3.699.525.350	3.699.525.350
Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat Transportasi											
a) Pertumbuhan Unit Usaha	Unit	561	561	582	582	594	594	1.048	1.048	1.099	1.099
b) Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	5.792	5.792	6.093	6.093	6.293	6.293	7.115	7.115	7.494	7.494
c) Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	199.656.017.575	199.656.017.575	273.575.317.575	273.575.317.575	393.877.534.186	393.877.534.186	404.704.534.187	404.704.534.187	407.687.889.187	407.687.889.187
Industri Hasil Hutan, Kimia dan Bahan Bangunan											
a) Pertumbuhan Unit Usaha	Unit	474	474	480	480	485	485	492	492	544	544
b) Pertumbuhan Tenaga Kerja	Orang	4.135	4.135	4.179	4.179	4.231	4.231	4.245	4.245	4.623	4.623
c) Pertumbuhan Investasi	Rp (juta)	142.247.715.205	142.247.715.205	142.908.215.205	142.908.215.205	155.427.630.205	155.427.630.205	155.972.630.205	155.972.630.205	156.367.610.205	156.367.610.205

Tabel diatas adalah tabel yang menunjukkan kinerja Dinas di sektor industri. Terlihat dari tabel diatas, jumlah Industri Kecil Menegah di kota Samarinda selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jumlah Industri Kecil Menengah ditargetkan sebesar 2.372 unit. Realisasinya pada tahun 2020 terdapat 2.372 unit IKM, yang diartikan terdapat capaian target.

Tabel 2.14
DATA CAPAIAN KINERJA
SEKTOR PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA
TAHUN 2016 - 2020

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target capaian pada akhir tahun perencanaan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio (%) Capaian pada Tahun ke-					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Meningkatnya Pengembangan Industri	Pertumbuhan IKM	Persen	2,00	2,86	2,50	2,86	2,00	2,05	2,10	2,15	2,50	2,86	2,00	2,05	2,10	2,15	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.6

DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGARAN SEKTOR KOPERASI DAN UKM KOTA SAMARINDA

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	BELANJA OPERASI	6.819.897.929	7.526.937.792	8.334.788.198	9.249.723.600		6.940.338.505	7.091.985.361	8.070.532.626	8.710.970.234		89,73	94,28	96,83	94,28			
	BELANJA MODAL	0	77.000.000	25.000.000	168.000.000		0	77.000.000	25.000.000	167.841.000		0	100	100	99			

Tabel 2.32

DATA PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGARAN SEKTOR PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Peningkatan Produktifitas dan Kualitas perajin kota Samarinda (Dekranasda)	0	0	1.250.000.000	1.300.000.000	400.000.000	450.000.000	0	0	267.000.000	370.000.000	350.000.000	436.000.000	0	0	21,36	28,46	87,50	96,89	1,47	8,04
2	Bentuk IKM Agro di Kota Samarinda	0	0	500.000.000	550.000.000	120.000.000	130.000.000	0	0	0	75.000.000	138.450.000	261.000.000	0	0	0	13,64	115,37	200,77	0,77	23,72
3	Pelatihan IKM Aneka di Kota Samarinda	0	0	500.000.000	550.000.000	120.000.000	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembinaan dan Pengawasan mutu serta kualitas produk	0	0	300.000.000	350.000.000	0	0	0	0	23.500.000	0	0	0	0	0	7,83	0	0	0	0	0

No	Urusan *)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Industri aneka Kota Samarinda																				
5	Pembinaan dan Pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan Alat transportasi di Kota Samarinda	0	0	300.000.000	350.000.000	0	0	0	0	29.500.000	0	0	0	0	0	9,83	0	0	0	0	0
6	Bimtek Industri Logam, Mesin, Perekayasaan, Elektronika dan alat transportasi	0	0	300.000.000	350.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	75.000.000	188.440.000	219.000.000	0	0	0	21,43	188,44	181,67	2,30	6,14
7	Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan bagi pelaku Industri hasil hutan, kimia dan bahan bangunan	0	0	300.000.000	350.000.000	120.000.000	130.000.000	0	0	29.500.000	0	0	0	0	0	9,83	0	0	0	1,11	0
8	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Agro	0	0	400.000.000	450.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	0
9	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Aneka	0	0	400.000.000	450.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	190.317.500	165.317.500	0	0	0	0	190,32	137,76	0,93	-7,01
10	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Logam Mesin, Perekayasaan, elektronika dan alat transportasi	0	0	400.000.000	450.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,93	0
11	Revitalisasi Sarana Produksi Industri Hasil Hutan, Kimia dan bahan bangunan	0	0	400.000.000	450.000.000	120.000.000	130.000.000	0	0	0	100.000.000	200.000.000	261.000.000	0	0	0	2,22	166,67	200,77	0,90	10,87
12	Fasilitasi Pendaftaran Merk HKI, Halal dan Pembinaan terhadap keuletanan Pelaku usaha akan wajib SNI	0	0	650.000.000	700.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	100.000.000	87.000.000	0	0	0	0	100	72,5	0,94	(-) 6,95

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
13	Pembinaan Pengolahan Limbah/Daur Ulang Bagi IKM di Kota Samarinda	0	0	360.000.000	375.000.000	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,12	0
14	Peningkatan Penyuluhan industri kecil dan menengah (IKM)	0	0	0	0	100.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33	0
15	Pembinaan dan Pemantapan Sentra Industri	0	0	0	0	200.000.000	220.000.000	0	0	0	0	140.000.000	0	0	0	0	0	70	0	4,76	0
16	Monitoring dan Evaluasi Legalitas Usaha Industri di Kota samarinda	0	0	600.000.000	500.000.000	100.000.000	125.000.000	0	0	22.130.000	75.000.000	100.000.000	67.000.000	0	0	4,43	15	100	67	1,64	(-) 0,004
17	Penyusunan sistem informasi industri yang berbasis database website	0	0	0	250.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	0	0	0	72	0	0	0	0
18	Pemeliharaan sistem informasi industri yang berbasis database, website	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	67.000.000	0	0	0	0	0	67	0	0
19	Pengembangan Informasi Industri di Kota Samarinda	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Pengumpulan dan pengolahan data industri Agro, Hasil hutan, Kimia dan bahan bangunan	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
21	Pengumpulan dan pengolahan data industri Logam, Mesin, Perekayasaan , Elektronika dan Alat transportasi	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
22	Singkronisasi data industri Agro, Hasil hutan, Kimia dan bahan bangunan	0	0	0	0	150.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0

No	Uraian *)	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Persentase Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
23	Sinkronisasi data industri Logam, Mesin, Perekayasaman Elektronika dan Alat transportasi	0	0	0	0	150.000.000	170.000.000	0	0	0	0	118.610.000	102.610.000	0	0	0	0	79,07	60,36	6,25	(-) 7,23
24	Revitalisasi Sarana Prasarana Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Samarinda	0	0	0	0	1.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,33	0
25	Pembangunan Sarana Prasarana sentra industri kecil menengah (IKM) di Kota Samarinda	0	0	0	0	1.000.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
26	Pembangunan gedung produksi sentra IKM tahu tempe	0	0	0	0	800.000.000	900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,88	0
27	Pematangan Lahan Sentra IKM Tahu dan Tempe	0	0	0	0	1.000.000.000	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
28	Revitalisasi Sentra IKM Kecamatan Sungai Kunjang(DAK Fisik Sentra IKM 2017)	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
29	Revitalisasi IPAL Tahu dan Tempe di Kota Samarinda(DAK 2016) (Pembayaran kepada pihak ketiga 2016)	0	367.800.000	0	0	0	0	0	367.800.000	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
30	Peningkatan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) IKM	0	0	0	0	100.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,09	0
JUMLAH		0	337.960.000	1.151.175.000	4.206.100.000	2.917.048.750	1.598.000.000	691.063.000	311.636.000	1.083.370.000	3.302.746.663	2.528.206.969	1450.750.696	71,44%	94,61%	96,10%	82,36%	92,32%	92,38	43,78%	56,31%

Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Dalam menghadapi periode RPJMD 2021 – 2026, kondisi lingkungan pemberdayaan Koperasi dan UKM menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Pemberdayaan Koperasi dan UKM periode 2021 – 2026 di Kota Samarinda dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2

STRENGTH (Kekuatan) 1. Komintmen dan Kebijakan terkait pemberdayaan Koperasi dan UKM sangat kuat 2. Koperasi dan UKM dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian, dikarenakan koperasi dan UKM hanya relatif membutuhkan modal kecil dan bersifat padat karya. 3. Tingginya keanekaragaman potensi dan produk daerah	**WEAKNESS (Kelemahan)** 1. Masih rendahnya kewirausahaan dan kompetensi SDM Koperasi dan UKM 2. Rendahnya pemanfaatan teknologi dan keterbatasan permodalan 3. Masih terbatasnya jejaring usaha dan pemasaran
OPPORTUNITY (Kesempatan) 1. Regulasi tentang Koperasi dan UKM memberikan kesempatan yang luas untuk pengembangan Koperasi dan UKM 2. Adanya alokasi pembiayaan dari Kementrian Koperasi dan UKM melalui LPDB dan KUR	**THREAT (Ancaman)** 1. Tantangan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2. Perkembangan Ilmu pengetahuan, Teknologi Informasi dan persaingan global

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan Koperasi dan UKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan Koperasi dan UKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM, UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008, Permendagri No. 83 Tahun 2014 tentang Ijin Usaha Mikro Kecil Menengah, selain itu Pemerintah Kota Samarinda juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi dan UKM yaitu :

Peraturan Walikota Samarinda tentang Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kota Samarinda tentunya mem-berikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan Koperasi dan UKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan Koperasi dan UKM.

Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal melalui skema dana bergulir oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi Koperasi dan UKM dalam mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembebasan biaya ijin bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan adanya perjanjian ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA), tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UKM semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Kota Samarinda pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UKM untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM yang masih harus menjadi perhatian dalam periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai motor penggerak perekonomian.
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk Koperasi dan UKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya akses pasar, dan terbatasnya permodalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM untuk menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.

4. Dampak pandemi co-19 di tahun 2020 yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional terkoreksi minus lebih dari 5%, sehingga pergerakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah terkendala dalam mengembangkan usahanya.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global selalu memposisikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga. Dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda harus memerhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disusun sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas serta fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026).

3.1 Idientifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda antara lain adalah perumusan kebijakan teknis bidang koperasi,

usaha mikro kecil menengah dan perindustrian sesuai dengan RJPMD yang ditetapkan Pemerintah Kota Samarinda, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah :

1. Terbatasnya Jumlah Aparatur Pembina
2. Terbatasnya Kemampuan manajerial Pengurus Koperasi, UMKM dan IKM, Banyak Koperasi, UMKM dan IKM yang belum dapat mengakses permodalan dari Lembaga Keuangan.
3. Masih terbatasnya akses permodalan bagi UMKM dan IKM
4. Pemasaran produk Koperasi, UMKM dan IKM masih sebatas pasar lokal
5. Masih terbatasnya SDM koperasi, UMKM dan IKM dalam pengetahuan teknologi dan informasi
6. Rendahnya daya saing Koperasi dan, UMKM dan IKM dalam memasuki pasar global
7. Belum adanya pengembangan kawasan peruntukan industri, terutama perhatian khusus terhadap pengembangan sentra-sentra industri.

3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam periode 2021-2026 Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju MASYARAKAT MADANI. MADANI sebagai akronim dari kata MAJU, BERBUDAYA DAN HARMONI yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota MAJU, yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota sungai (the spirit of river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas, kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
3. Kota yang selalu menjaga hubungan HARMONI antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Ketiga landasan Kota Peradaban tersebut harus didukung kedalam lima aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yakni :

- Pertama, bidang Sosial dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
- Kedua, bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (entreprenuer) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
- Ketiga, bidang politik ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
- Keempat, bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-

nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.

- Kelima, bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan visi Kepala Daerah, selanjutnya dijabarkan **MISI** Kota Samarinda sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya.
2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan & Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang mantap & Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni & Lestari.

Dari kelima misi tersebut, misi kedua yaitu mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan merupakan misi yang melibatkan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyukseskan misi tersebut. Koperasi dan UKM merupakan pelaku penggerak ekonomi di Samarinda.. Sasaran yang ingin dicapai dari misi mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan adalah Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya.

Guna mendukung 5 misi diatas Pemerintah Kota Samarinda menetapkan 10 Program prioritas yang terdiri dari :

1. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya)
2. Program Pengendalian Banjir dan Pengembangan Sistem Drainase Modern
3. Program Pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan Ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)

4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)
5. Program Smart City Plus
6. Program Doctor On Call Untuk Kondisi Darurat, Lansia, dan Balita
7. Program bantuan peralatan dan sarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Program Badan Usaha Milik Rt (Berbasis Kelurahan)
9. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi, dan Satu Kelurahan Satu Play Ground
10. Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mendukung melalui program prioritas 10 yaitu program penciptaan 10.000 wirausaha baru.

3.3 Telaah Renstra Kementrian Koperasi dan UKM RI

Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2020 – 2024, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi "Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing". Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global" dengan misi terdiri atas :

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2022 – 2026 yang meliputi :

1. Digitalisasi Koperasi dan UMKM;
2. Pembangunan Koperasi yang terintegrasi dengan perhutanan sosial khususnya sektor pangan dan komoditas sawit;

3. Pembangunan Trading House;
4. Pembangunan sentra pemasaran produk UKM di daerah; dan
5. Pengembangan Database UMKM.

Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 4 Key Development Milestones yang terdiri atas :

1. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (Scaling Up);
3. Melahirkan Wirausaha Baru (New Entrepreneur);
4. Modernisasi Koperasi.

Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PLUT – KUKM) di daerah melalui APBN Tugas Pembantuan/DAK. PLUT – KUKM ditujukan untuk memberikan layanan konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk unggulan daerah. Dalam hal peningkatan SDM pelaku Koperasi dan UKM, Kementerian juga mengadakan program kegiatan Peningkatan Kapsitas Koperai dna UKM ,melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

3.4. Telaahan Renstra Kementrian Perindustrian

Dinamika perekonomian dunia dan domestik telah mewarnai perjalanan pembangunan perdagangan dan perindustrian nasional. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks dan turut memengaruhi kinerja perindustrian di Indonesia.

- Renstra Kementrian Perindustrian Tahun 2020-2024

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, disebutkan bahwa struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti

luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk- produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian, maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".**
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong apabila dipandang dalam sudut pandang sektor industri yaitu ***mewujudkan industri tangguh dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja melalui penambahan lapangan kerja baru serta meningkatnya investasi dan ekspor sektor industri sehingga dapat bersaing dengan negara maju lainnya***. Pemanfaatan teknologi dimaksudkan dapat mengelola sumber daya yang ada dengan kekuatan SDM yang kompeten dan IPTEK yang inovatif melalui implementasi Making Indonesia 4.0 untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Mengacu berdasarkan visi Presiden dan Wakil Presiden diatas berusaha untuk dicapai melalui 9 (sembilan) misi yang telah dimandatkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan Misi Kementerian Perindustrian yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders industri, yakni pemerintah baik pusat/ daerah, investor, pengusaha, asosiasi, pegawai/ karyawan, dan masyarakat industri lainnya. Kesembilan misi-misi di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong bagi semua kementerian/lembaga. Kementerian Perindustrian fokus pada pembangunan dan pengembangan sektor industri pengolahan nonmigas sehingga dapat memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi kepentingan bangsa Indonesia

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu **"Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional"**. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama, yaitu:

a. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)
c. Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)
d. Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US$ Miliar)

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian dapat digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas.
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri

4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran Industri
7. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

3.5 Telaah Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Koperasi, UKM dan Industri di Kota Samarinda.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Permendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang mendorong suatu kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral guna menciptakan kesetaraan serta keadilan gender, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda senantiasa memperhatikan isu – isu aktual terkait kesetaraan dan keadilan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan sektor Koperasi, UKM dan Industri.

Sesuai dengan RPJMD Kota Samarinda 2021 – 2026 yang menyatakan bahwa kaum wanita masih cenderung mengalami diskriminasi gender dalam berbagai faktor, maka arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Koperasi dan UKM Tahun 2021 – 2026 difokuskan pada perluasan akses kredit bagi perempuan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelompok

wanita usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para ibu pelaku usaha.

Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* sejak Tahun 2019 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi, UMKM dan IKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Selain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

3.6 Isu Strategis

Dari penjelasan diatas terdapat isu strategis yang menjadi prioritas pemberdayaan Koperasi UKM dan Perindustrian nasional 2020 – 2024, yaitu :

1. Perluasan Akses Pasar;
2. Meningkatkan Daya Saing;
3. Pengembangan Kewirausahaan;
4. Akselerasi Pembiayaan dan Investasi;
5. Kemudahan dan Kesempatan Berusaha; dan
6. Koordinasi Lintas Sektor.

Sedangkan isu strategis Pemerintah Kota Samarinda yang sejalan dengan program kerja kementerian dan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan

Perindustrian tertuang dalam visi misi dan program kerja Kepala Daerah 2021-2026 adalah :

1. Program Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan)
2. Program Penciptaan 10.000 Wirausaha Baru.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan Koperasi, UKM dan Perindustrian, telaah visi misi Pemerintah Kota Samarinda dan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Renstra Kementrian Perindustrian serta isu – isu strategis pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perindustrian di Kota Samarinda.

A. VISI dan MISI

Sesuai dengan dokumen RPJMD, Visi Pemerintah Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah:

"TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN"

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kota tersebut dengan berbagai kebijakan untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda Tahun 2021-2026 menerjemahkanya, sebagai berikut :

- Terwujudnya Aparatur yang handal adalah aparatur yang tangguh, pantang menyerah dalam membina koperasi dan UKM/IKM.
- Koperasi dan UKM/IKM memiliki kemampuan dalam Penguatan Sumber Daya dengan segala potensi yang dimiliki untuk menjawab tantangan global.

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan Misi Pemerintah Kota Samarinda sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Kota yang Religius, Unggul & Berbudaya.

2. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Maju, Mandiri, Berkerakyatan & Berkeadilan.
3. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan bebas Korupsi.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang mantap & Modern.
5. Mewujudkan Lingkungan Kota yang Aman, Nyaman, Harmoni & Lestari

Misi pemerintah Kota Samarinda secara otomatis menjadi Misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, untuk mendukung misi tersebut dipandang perlu untuk menetapkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Adapun untuk mendukung Misi pemerintah Kota Samarinda, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri.

   Hal ini di titik beratkan pada peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan koperasi, UKM dan industry, yang mana diharapkan dengan hal tersebut maka akan lebih mengoptimalkan dalam hal pembangunan koperasi, UKM dan Industri.
2. Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, UMKM dan Industri.

   Mengarah pada pengembangan usaha mikro kecil menengah dan suatu usaha nyata dalam pembangunan bidang Koperasi dan UKM, secara eksplisit ditujukan pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk itu diperlukan pengembangan produk-produk daerah yang berdaya saing
3. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Industri yang Profesional dan Berkualitas

Hal ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan citra koperasi, membina dan memberdayakan Koperasi agar lebih aktif dan berdaya saing

4. Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri.
   Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM pembina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah (KUMKM) demi meningkatkan pelayanan prima. Permasalahan utama dalam pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah belum optimalnya kompetensi dan ketrampilan SDM pembina yang mengikuti diklat teknis.
5. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM).
   Hal ini dimaksudkan sebagai optimalisasi pengembangan IKM melalui sentra-sentra IKM, baik yang sentra alami maupun buatan.
6. Meningkatkan Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri
   Pengendalian dan pengawasan legalitas usaha industri sebagai upaya menjamin kepastian berusaha dan menciptakan iklim usaha industri yang kondusif.
7. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan sistem informasi industri.
   Hal ini memungkinkan tersajinya data IKM dan pengelolaan SIINas.

Dengan pernyataan hal-hal tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda serta mengetahui alasan keberadaan dan peranannya. Misi juga menunjukan tujuan utama kearah mana perencanaan/program instansi ingin dicapai. Untuk itu dalam proses perumusannya, harus memperhatikan masukan-masukan dari pelanggan *(Stakeholder)*, dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian dengan tuntutan lingkungan.

Seperti diketahui Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan Koperasi, UMKM dan Industri dengan *tujuan* sebagai berikut :
   - Meningkatkan peran serta masyarakat
   - Meningkatkan partisipasi dunia usaha

   Sasaran : Meningkatnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha
2. Meningkatkan Kerjasama, Pangsa Pasar, Jaringan Usaha, Fasilitas dan Kemampuan Akses Permodalan Koperasi, UMKM dan Industri dengan tujuan sebagai berikut :
   - Meningkatkan persentase jumlah Koperasi aktif

   Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan koperasi, UKM/IKM yang aktif dan berkualitas
3. Mengembangkan dan Memberdayakan Koperasi, UMKM dan Industri yang Profesional dan Berkualitas dengan tujuan sebagai berikut :
   - Meningkatkan Koperasi sehat dan produk UKM/IKM yang bedaya saing

   Sasaran : Bertambahnya Koperasi sehat dan produk UKM/IKM yang mempunyai daya saing
4. Meningkatkan Pengawasan SDM Bidang Koperasi, UMKM dan Industri dengan tujuan sebagai berikut :
   - Meningkatkan kualitas SDM pengelola Koperasi dan UKM/IKM yang kompeten

   Sasaran : Meningkatnya jumlah SDM pengelola koperasi dan UKM/IKM yang kompeten

B. TUJUAN

Adapun Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menetapkan tujuan, penetapan tujuan didasarkan pada sasaran strategis Pemerintah Kota Samarinda, sasaran strategis merupakan penjabaran visi misi Pemerintah Kota Samarinda. Mengacu pada tupoksi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, yaitu sektor Koperasi, UKM dan Perindustrian, maka Tujuan Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut :

- Meningkatnya kewirausahaan baru.

  Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda melaksanakan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM untuk mendorong meningkatnya kewirausahaan baru.

C. SASARAN

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda di dalam menyusun Renstra telah menetapkan sasaran, sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yang akan dicapai dengan melaksanakan program dan kegiatan, sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagai berikut yaitu :

1. Menumbuhkan dan memberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM
2. Meningkatnya Pembangunan Industri

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi,UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra SKPD dijabarkan sebagai berikut :

A. Menumbuhkan dan memberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM

1. Strategi pertama:
   - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

   Kebijakan :
   - ❖ Peningkatan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
2. Strategi kedua :
   - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

   Kebijakan :
   - ❖ Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
3. Strategi Ketiga :
   - ❖ Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

Kebijakan :

- Peningkatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

4. Strategi keempat :
   - Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

   Kebijakan :
   - Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5. Strategi Kelima :
   - Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi

   Kebijakan :
   - Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
6. Strategi Keenam :
   - Pengembangan dan pemberdayaan UMKM

   Kebijakan :
   - Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
7. Strategi ketujuh :
   - Pengembangan UMKM

   Kebijakan :
   - Peningkatan Fasilitasi Usaha Mikro

B. Meningkatnya Pembangunan Industri

1. Strategi pertama :
   - Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM)

   Kebijakan :
   - Peningkatan dan pengembangan kawasan peruntukan industri dan industri kecil menengah (IKM)
2. Strategi kedua :
   - Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri

   Kebijakan :
   - Peningkatan pengawasan pelaksanaan izin usaha industri

3. Strategi ketiga :
   - Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri

   Kebijakan :
   - Peningkatan pengembangan sistem informasi industri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2021-2026, Program yang dilakukan Dinas , UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan menteri dalam negeri nomor 050 Tahun 2020 dan 2021 Tentang Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   1. **Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
      1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhitahir SKPD.
1.7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3.2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.3. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.4. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.6. Sub Kegiatan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material
4.8. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD
4.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
   5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   5.4. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   5.5. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
   5.6. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   5.7. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   6.3. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

7.3. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.

7.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.5. Sub kegiatan pemeliharaan asset tetap lainya

7.6. Sub kegiatan pemeliharaan asset tak berwujud

7.7. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7.8. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya

7.9. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya

2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota

   1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.

2. Kegiatan Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota

   2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupten/kota.

3. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**
   1. Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota
      1.1. Sub Kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian,ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota
      1.2. Sub Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota
      1.3. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
      1.4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
   1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam (1) daerah kabupaten/kota
      1.1. Sub Kegiatan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
      1.2. Sub penghargaan kesehatan ksp/usp koperasi kewenangan kabupaten/kota
      1.3. Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.

5. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**
   1. Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
      1.1. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi (termasuk DAK non fisik)

6. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**
   1. Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
      1.1. Sub Kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
      1.2. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
      1.3. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

7. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**
   1. Kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
      1.1. Sub Kegiatan pendataan potensi dan pengembangaan usaha mikro
      1.2. Sub Kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
      1.3. Sub Kegiatan fasilitasi kemudahaan perijinan usaha mikro
      1.4. Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro
      1.5. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
      1.6. Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan.

1.7. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

1.8. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (DAK Non Fisik)

8. Program Pengembangan UMKM

1. Kegiatan pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skla usaha menjadi usaha kecil

   1.1. Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi

   1.2. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro

   1.3. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1. Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota

   1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

   1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

   1.3. Sub Kegiatan koordinasi singkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri

   1.4. Sub Kegiatan koordinasi singkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri

   1.5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

1.6. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

10. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota

2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan singkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

2.4. Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).

11. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

3. Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota

3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data

lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Infromasi Industri Nasional (SIINas)

3.2. Sub Kegiatan diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas

3.3. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi, UKM dan industri perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

PROGRAM KEGIATAN TEKNIS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																
1	PROGRAM PELAYANAN DIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pemeriksaan fasilitasi pemeriksaan bin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	Persen	28,72	-	56,14	-	3,22	200.000.000	5,22	210.000.000	6,44	220.000.000	6,88	230.000.000	6,83	
1.1	Kegiatan Pemeriksaan bin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	Jumlah Koperasi yang diberdikan bin Usaha simpan pinjam	Koperasi	203	-	203	-	40	200.000.000	30	210.000.000	25	220.000.000	30	230.000.000	428	
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi pemeriksaan bin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit usaha	203	-	203	-	30	100.000.000	30	110.000.000	25	120.000.000	30	130.000.000	2.195	
1.1.2	Kegiatan Pemeriksaan bin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk	Jumlah Cabang Koperasi yang diberdikan bin	Unit Usaha	-	-	-	-	30	100.000.000	30	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	95	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
	koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Usaha simpan pinjam															
1.2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi pemerintah bin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	-	-	-	-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	40	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kehuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	Persen	24,79	-	46,83	175.000.000	46,79	185.000.000	31,58	210.000.000	19,87	225.000.000	19,87	240.000.000	19,87	
2.1	Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	Koperasi	475	-	770	175.000.000	502	185.000.000	348	210.000.000	348	225.000.000	348	240.000.000	1.848	
3.1.1	Sub Kegiatan Pengawasan kehuatan, kesehatan, kemandirian,kelanggunan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten dan kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kehuatan, kesehatan, kemandirian, kelanggunan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	308	-	486	75.000.000	125	75.000.000	-	-	-	-	-	-	621	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
3.1.2	Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	Unit usaha	167	-	217	105.000.000	267	120.000.000	-	-	-	-	-	-	484	
3.1.3	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	124	90.000.000	124	85.000.000	124	90.000.000	374	
3.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	124	130.000.000	124	140.000.000	124	150.000.000	374	
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya**	**Persen**	**16,50**	-	**19,80**	**210.000.000**	**99,00**	**220.000.000**	**20,31**	**480.000.000**	**4,43**	**500.000.000**	**4,46**	**650.000.000**	**4,43**	
3.1	**Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan**	**Koperasi**	**175**	-	**220**	**210.000.000**	**200**	**220.000.000**	**55**	**450.000.000**	**55**	**550.000.000**	**55**	**650.000.000**	**640**	
3.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit usaha	175	-	200	105.000.000	225	110.000.000	36	200.000.000	36	250.000.000	36	400.000.000	535	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
3.1.3	Sub Kegiatan Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi berkategori kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Unit usaha	-	-	20	[illegible]	20	[illegible]	-	-	-	-	-	-	60	
3.1.2	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	25	[illegible]	25	200.000.000	25	200.000.000	75	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	-	-	20	200.000.000	16,32	200.000.000	18,32	210.000.000	21,74	210.000.000	24,15	220.000.000	24,15	
4.1	Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	210	-	200	200.000.000	240	200.000.000	240	210.000.000	270	210.000.000	300	220.000.000	1.410	
4.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	200	-	200	200.000.000	240	200.000.000	240	210.000.000	270	210.000.000	300	220.000.000	1.410	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang dikeluarkan dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	16,38	-	24,17	[illegible]	24,94	[illegible]	30,88	[illegible]	33,89	[illegible]	36,71	[illegible]	36,71	
5.1	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang berorganisasi	Jumlah SDM yang ter/di berkoperasi	Orang	200	-	250	[illegible]	300	[illegible]	350	[illegible]	400	[illegible]	450	[illegible]	2.350	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
	dalam daerah kabupaten/kota																
5.3.1	Sub Kegiatan Pembantuyaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengualian kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah UKM yang memahami pengelahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	200	-	200	100.000.000	300	100.000.000	-	-	-	-	-	-	500	
5.3.2	Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Keluarga	-	-	-	-	600	50.0000.000	-	-	-	-	-	-	600	
5.3.3	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengualian Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah UKM Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pengualian Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	500	100.000.000	400	100.000.000	400	170.000.000	1.219	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wira usaha baru	Persen	41	-	52	840.000.000	28,76	840.000.000	27,32	990.000.000	32,60	930.000.000	30,25	990.000.000	30,25	
6.1	Kegiatan Pembiayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendalaan, kendiraan, kemudahan perijinan, pengusaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dikina	Unit Usaha	11.804	-	7.510	840.000.000	8.415	920.000.000	10.980	940.000.000	12.285	980.000.000	14.055	1.010.000.000	53.050	
6.1.1	Sub Kegiatan Pendalaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produksi, sendiri tumbuh, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, pengusaan kelembagaan, penelaan menejemen, standardisasi, dan mekanisasi/kolei usaha koperasi kesenangan kabupaten/kota	Unit usaha	3.054	-	4.500	200.000.000	4.400	300.000.000	-	-	-	-	-	-	8.000	
6.1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	1.300	-	1.500	150.000.000	2.000	150.000.000	2.500	155.000.000	3.000	160.000.000	3.000	160.000.000	12.500	
6.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perijinan	Unit usaha	300	-	400	140.000.000	825	175.000.000	915	175.000.000	1.150	200.000.000	1.450	220.000.000	4.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
4.1.4	Sub Kegiatan: Pendampingan kelembagaan potensi dan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit usaha	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.750	[illegible]	2.350	[illegible]	3.050	[illegible]	[illegible]	
4.1.5	Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembinaan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembinaan usaha mikro	Orang	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	1.150	[illegible]	1.400	[illegible]	1.700	[illegible]	2.000	[illegible]	7.000	
4.1.6	Sub Kegiatan: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kapasitas SDM usaha mikro dan koperasiwan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan koperasiwan	Orang	-	-	-	-	50	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50	
4.1.7	Sub Kegiatan: Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Tertata	Unit usaha							3.000	[illegible]	2.000	[illegible]	2.000	[illegible]	8.000	
4.1.8	Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Koperasiwan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Koperasiwan	Orang							50	30.000.000	50	30.000.000	50	[illegible]	150	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan	Persen	-	-	3	[illegible]	3	[illegible]	1,27	[illegible]	1,27	[illegible]	1,27	[illegible]	6,36	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	[illegible]	
		fasilitasi pemasaran															
1.1	Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Unit Usaha	238	-	438	[illegible]	388	[illegible]	488	[illegible]	488	[illegible]	488	[illegible]	2.922	
1.1.1	Sub kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM,serta desain dan teknologi	Unit usaha	238	-	438	350.000.000	388	[illegible]	-	-	-	-	-	-	922	
1.1.2	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	360	270.000.000	360	270.000.000	360	270.000.000	1.080	
1.1.3	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	40	50.000.000	40	300.000.000	40	[illegible]	120	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Perhimbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persen	2,25	1.087.200.000	2,25	2.027.642.489	29,71	2.088.500.000	30,01	2.151.000.000	31,45	2.213.000.000	32,39	2.276.100.000	33,29	
1	Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.087.200.000	2	2.027.642.489	2	2.088.500.000	2	2.151.000.000	2	2.213.000.000	2	2.276.100.000	2	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Dokumen	0	0	0	150.000.000	0	154.500.000	1	159.000.000	1	162.000.000	1	166.000.000	0	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Persepakan Pengembangan, Penyebaran dan Pemelayahan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan persepakan, pengembangan, penyebaran dan pemelayahan industri	Dokumen	0	0	0	100.000.000	0	103.000.000	1	106.000.000	1	108.000.000	1	113.000.000	0	
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	0	1.287.204.300	0	469.642.089	0	472.000.000	1	480.000.000	1	500.000.000	1	514.100.000	0	
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Dokumen	0	260.000.171	0	410.998.423	0	432.000.000	1	446.000.000	1	465.000.000	1	474.000.000	0	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembantayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembantayaan industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	5	5	5	500.000.000	5	515.000.000	1	530.000.000	1	545.000.000	1	560.000.000	5	
1.6	Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	5	400.000.000	5	400.000.000	5	412.000.000	1	424.000.000	1	436.000.000	1	448.000.000	5	
0	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Pelaku usaha industri yang diawasi**	**Pelaku Usaha Industri**	**275**	**96.200.000**	**275**	**200.000.000**	**285**	**206.000.000**	**290**	**212.000.000**	**300**	**218.000.000**	**315**	**226.000.000**	**1.475**	
2	**Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pelaku usaha industri yang diawasi**	**Pelaku Usaha Industri**	**275**	**96.200.000**	**275**	**200.000.000**	**285**	**206.000.000**	**290**	**212.000.000**	**300**	**218.000.000**	**315**	**226.000.000**	**1.475**	
2.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Tahnis Pemenuhan Kewenangan Pelayanan Tahnis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perkasaan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko	Dokumen	5	0	5	50.000.000	5	51.500.000	-	-	-	-	-	-	10	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
		Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Nilai Ekspor yang Terintegrasi dengan Sistem OSS															
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	10	
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor pertindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri kangan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis di seluruh Kab./Kota sepanjang menyangkut Penanaman Modal Dalam Negeri dan sesuai bidang	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	170.000.000	3	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STIN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
		usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															
2.4	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan penyelenggaraan standar kegiatan usaha sektor pemukiman dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan penyelenggaraan standar kegiatan usaha sektor pemukiman dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor pemukiman dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Pendaftaran Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, sebagai bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	55.000.000	1	56.000.000	1	58.000.000	3	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan	Pelaku IKM	0	602.206.625	0	467.206.718	0	481.306.000	0	495.306.000	0	500.300.000	0	503.306.000	30	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
		Informasi Industri															
3	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUMI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Industri	Dokumen	0	403.289.625	5	467.288.738	5	481.300.040	4	496.290.040	4	509.290.000	4	523.300.000	26	
3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	0	0	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.000.000	1	109.000.000	1	112.000.000	15	
3.2	Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	0	403.289.625	3	367.288.738	3	378.300.040	1	390.290.040	1	401.290.000	1	412.300.000	13	
3.3	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan	Dokumen	0	0	1	100.000.000	1	103.000.000	1	106.000.000	1	109.000.000	1	112.000.000	10	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
	Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas															

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

PROGRAM KEGIATAN NON TEKNIS

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	Nilai	79	-	80	11.793.919.000	81	12.009.719.000	83	12.205.919.000	83	12.502.419.000	84	12.809.919.000	84	
1	Kegiatan Perencanaan, Pengangguran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	7	-	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	31	
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	31	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	2	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	Dokumen	1	2	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
		dokumen DPA-SKPD															
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	
1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	4	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	20	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Dokumen	12	11.707.000.000	12	11.707.000.000	12	17.082.947.000	12	12.273.000.000	12	12.273.000.000	12	12.273.000.000	12	
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bln	77	10.000.000.000	77	10.000.000.000	77	10.000.000.000	77	11.000.000.000	77	11.000.000.000	77	11.000.000.000	77	
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	21	828.100.000	39	850.000.000	39	876.000.000	39	902.000.000	39	928.000.000	39	964.000.000	39	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ST/N	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7	6	7	70.000.000	7	80.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	7	70.000.000	35	
3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai**	Orang/orang	77	6	77	**267.496.000**	77	**267.496.000**	77	**267.496.000**	77	**267.496.000**	77	**267.496.000**	77	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	77	-	77	85.000.000	77	100.000.000	77	100.000.000	77	100.000.000	77	100.000.000	77	
3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	-	-	70	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	170	
3.3	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	5	-	5	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	45	
3.4	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	-	-	10	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	40	100.000.000	170	
4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi umum**	Persen	100	-	100	**826.000.000**	100	**861.700.000**	100	**867.400.000**	100	**883.100.000**	100	**898.800.000**	100	
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Paket	2	-	2	10.000.000	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	1	21.500.000	6	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STR	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
		kantor yang dievaluasi															
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	5	-	5	250.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	9	
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	-	-	3	15.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	1	37.000.000	7	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	-	3	20.000.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	1	40.500.000	9	
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	-	4	30.000.000	1	81.200.000	1	81.200.000	1	81.200.000	1	81.200.000	20	
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	-	6	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	
4.7	Sub Kegiatan Penyediaan bahan material	Jumlah pekerjaan material yang disediakan	Paket	-	-	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	
4.8	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	-	-	12	30.000.000	27	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	50	135.000.000	189	
4.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	-	-	1	900.000.000	1	993.500.000	1	993.500.000	1	993.500.000	1	993.500.000	5	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGG UNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
4.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen pemeliharaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	-	3	3	[illegible]	30	[illegible]	30	[illegible]	30	[illegible]	30	[illegible]	240	
5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Laporan rencana kebutuhan barang**	**Laporan**	**13**	**4**	**13**	**[illegible]**	**13**	**[illegible]**	**13**	**[illegible]**	**13**	**[illegible]**	**13**	**[illegible]**	**13**	
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Unit	-	-	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	2	[illegible]	10	
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	Unit	-	-	1	[illegible]	6	[illegible]	6	[illegible]	6	[illegible]	6	[illegible]	25	
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Unit	-	-	8	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	10	[illegible]	48	
5.4	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	-	-	-	-	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	20	
5.5	Sub Kegiatan Pengadaan Asset Tak Berwujud	Jumlah unit asset tak berwujud yang diadakan	Unit	-	-	-	-	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	4	[illegible]	16	
5.6	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Unit	-	-	-	-	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	15	[illegible]	60	
5.7	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Unit					5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	5	[illegible]	20	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PASU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
		lainnya yang disediakan															
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemerjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	Dokumen	13	536.391.000	13	885.000.000	13	885.000.000	13	885.000.000	13	887.300.000	13	888.100.000	13	
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	52	465.833.000	52	840.000.000	52	840.000.000	52	840.000.000	52	840.000.000	52	840.000.000	52	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	5	0	5	5.000.000	7	5.200.000	9	5.400.000	12	5.600.000	14	5.800.000	47	
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	5	65.708.000	5	20.000.000	7	20.600.000	9	21.200.000	12	21.700.000	14	22.200.000	47	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan pemeliharaan	Laporan	13	1.063.533.000	13	2.231.000.000	13	2.385.000.000	13	2.333.000.000	13	2.384.000.000	13	2.435.000.000	13	
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	2	0	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	16	
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	15	86.110.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	216.000.000	15	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STN	CAPAIAN AWAL		TARGET DAN PAGU INDIKATIF										CAPAIAN AKHIR	BIDANG YANG BERTANGGUNG JAWAB
				2021		2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	2026	
	Operasional atau Lapangan	pajak dan perbinannya															
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perbinan Wal Basar	Jumlah unit bazar yang dipelihara dan dibayarkan perbinannya	Unit	2	5	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	2	5	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	
7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Asal Tetap Lainnya	Jumlah asal tetap lainnya yang dipelihara	Unit	2	5	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	
7.6	Pemeliharaan Asal Tak Berwujud	Jumlah asal tak berwujud yang dipelihara	Unit	1	3	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	
7.7	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	3	886.961.000	3	900.000.000	3	927.000.000	3	954.000.000	3	981.000.000	3	1.000.000.000	15	
7.8	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	100.852.500	1	800.000.000	1	824.000.000	1	848.000.000	1	873.000.000	1	898.000.000	1	
7.9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1	100.852.500	1	800.000.000	1	824.000.000	1	848.000.000	1	873.000.000	1	898.000.000	1	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja sasaran menjadi tujuan dan upaya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk diwujudkan dalam kurun waktu 5 tahun. Indikator tersebut dapat dicapai bila sumber daya organisasi dan asumsi – asumsi yang digunakan dapat dipenuhi. Pencapaian indikator dinas akan memberi kontribusi bagi pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang diproyeksikan setiap tahunnya. Adapun indikator dapat dilihat pada tabel berikut. :

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada RJPMD Kota Samarinda Tahun 2021 s/d 2026

Tabel 7.1

No.	Indikator	Satuan	Target RPJMD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Koperasi Sehat	Koperasi	12	13	14	15	16	17
2.	Peningkatan pelaku kewirausahaan	Unit usaha	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	8,00	8,10	8,20	7,48	7,49	7,50

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Capai an	Target	TAHUN - 2022		TAHUN – 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA						21.477.711.227		27.305.147.500		22.126.700.000		22.366.100.000		22.586.700.000		155.872.476.727
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI IKM	Nilai	65,00	70,00	80,00	13.891.269.211	79	14.622.042.894	82,33	13.459.629.000	83,35	13.750.419.000	85,40	14.040.915.000	88,40	69.537.348.605
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	Persentase	33,98	26,72	55,14	0	3,22	50.000.000	3,22	210.000.000	5,44	220.000.000	8,66	230.000.000	9,66	710.000.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan/kesehatan, kemandirian koperasi	Persentase	10,00	24,79	46,83	13.417.800	31,56	125.000.000	19,97	210.000.000	19,97	225.000.000	19,97	240.000.000	19,97	813.417.800

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Capaian	Target	TAHUN - 2022		TAHUN – 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persentase	12,07	16,02	18,88	215.000.000	20,13	225.000.000	4,43	450.000.000	4,83	350.000.000	5,23	850.000.000	73	2.177.199.150
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase	0,00	0,00	20,00	200.000.000	19,22	205.000.000	19,33	210.000.000	21,74	215.000.000	24,15	230.000.000	24,15	1.050.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	18,58	24,17	150.000.000	24,64	155.000.000	28,68	160.000.000	32,69	165.000.000	36,71	170.000.000	36,71	800.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	11,00	41,05	53,00	845.000.000	26,76	900.000.000	27,32	925.000.000	32,63	960.000.000	38,25	990.000.000	38,25	3.900.548.900
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	0,00	1,00	350.000.000	1,22	600.000.000	1,27	620.000.000	1,27	620.000.000	1,27	620.000.000	10	2.230.000.000

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Satuan	KONDISI AWAL PERENCANAAN		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
			Capaian	Target	TAHUN - 2022		TAHUN – 2023		TAHUN - 2024		TAHUN - 2025		TAHUN - 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	2,20	2,20	2,25	2.567.123.150	29,71	1.909.999.835	30,61	2.151.000.000	31,45	2.213.500.000	32,29	2.276.100.000	32,29	11.117.712.975
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku usaha industri yang dilayani	Pelaku Usaha Industri	275	275	275	116.393.050	285	174.998.800	295	213.000.000	305	219.500.000	315	226.000.000	1.475	949.892.850
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	Pelaku IKM	5	5	5	197.529.300	6	349.998.800	6	499.300.000	6	909.300.000	6	925.300.000	29	1.975.728.100

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi	Persentase	23,98	26,72	59,14	34,06	1,61	3,22	4,83
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan,Kesehatan, kemandirian koperasi	Persentase	10,00	24,79	46,83	31,56	19,97	19,97	19,97
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatanya	Persentase	12,07	16,52	18,88	20,13	4,43	4,48	5,23
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase	0,00	0,00	20,00	19,33	19,32	21,74	24,15

NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	16,58	24,17	24,64	28,66	32,69	36,71
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	Persentase	11,00	41,00	52,00	26,76	27,32	32,63	38,25
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Persentase	0,00	0,00	2,00	1,22	1,27	1,27	1,27
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase	2,20	2,20	2,25	29,71	30,61	31,45	32,29
9	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Pelaku usaha Industri yang diawasi	Pelaku Usaha Industri	275	275	275	285	295	305	315

NO	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan informasi industri	Pelaku IKM	5	5	5	6	6	6	6

BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk periode 2021 s/d 2026 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan mencapai keberhasilan yang sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda menetapkan visi dengan memperhatikan Rencana Strategis Kota Samarinda dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan, namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Oleh karena itu pelaksanaan Renstra membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan strategik ini memiliki kelenturan (*fleksibilitas*) dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perindustrian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda periode tahun 2021 s/d 2026 ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi masing-masing bidang, untuk itu semua aparatur harus melaksanakan dengan baik, akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Demikian Perencanaan Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda disajikan dengan harapan dapat membawa kemajuan bagi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, sehingga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh jajaran yang mendukung kemajuan Koperasi, UKM dan Industri yang ada.

Samarinda, 1 Juli 2023
Kepala Dinas,

Nurrahmani, SIP, MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196903011990032003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Metrik Perubahan RENSTRA (Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja) Tahun 2021-2026
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2022		2023		2024		2025		2026	
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
	Peningkatan Koperasi Sehat	Koperasi		12	13		14		15		16		17	
	Peningkatan pelaku kewirausahaan	Unit Usaha		1500	2000		3000		3000		3000		3000	
	Penerapan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen		8,00	7,47		8,22		7,49		7,69		7,84	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IKM	Nilai	0	76	81,23	15.891.167.211	78	14.651.040.884	80,37	15.459.619.000	80,55	15.755.419.000	80,40	16.040.816.000
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	0	60	62	29.097.800	67	100.000.000	69	105.800.000	71	133.200.000	74	133.200.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	0	0	0	11.822.800	0	50.000.000	0	52.000.000	0	55.000.000	0	56.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1	1	-	1	-	1	5.400.000	1	5.600.000	1	5.700.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	1	-	1	-	1	5.400.000	1	5.600.000	1	5.700.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	1	-	1	-	1	5.400.000	1	5.600.000	1	5.700.000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	1	1	-	1	-	1	5.400.000	1	5.100.000	1	5.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	0	1	1	17.275.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	58.000.000	1	64.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	0	4	4	-	4	20.000.000	4	21.200.000	4	21.400.000	4	22.400.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	Laporan	0	13	13	13.029.805.647	13	12.881.915.270	13	7.004.418.000	13	7.230.415.000	13	7.596.415.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	0	45	45	10.409.038.047	45	10.033.804.270	45	6.055.418.000	45	6.222.418.000	45	6.382.418.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	0	40	40	1.217.438.000	40	1.268.238.000	40	901.000.000	40	858.000.000	40	896.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	7	7	6.816.500	7	80.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pegawai**	Orang	0	79	79	-	79	-	79	167.400.000	79	167.400.000	79	167.400.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Akibatnya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	0	79	79	-	79	-	79	47.400.000	79	47.400.000	79	47.400.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	0	10	10	-	10	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	5	5	-	5	-	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	10	10	-	10	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan**	Dokumen	0	13	13	380.061.000	13	452.718.600	13	967.450.000	13	985.100.000	13	998.800.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	0	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	16.000.000	2	16.500.000	2	15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	0	2	2	-	2	30.896.600	2	158.000.000	2	158.000.000	2	158.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	0	2	2	-	2	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	0	5	5	7.000.000	5	28.700.000	5	16.000.000	5	16.300.000	5	17.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	0	4	4	25.000.000	4	32.000.000	4	42.400.000	4	43.000.000	4	44.800.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	0	5	5	-	5	-	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000
Penyediaan bahan material	Jumlah paket/bahan material yang disediakan	Paket				-		-						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	0	3	3	13.061.000	3	13.061.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	Laporan	0	30	30	220.000.000	35	219.878.000	37	477.000.000	39	490.500.000	41	504.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	0	200	200	-	100	-	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000
Pengadaan Barang MBR Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Laporan rencana kebutuhan barang**	**Laporan**	**0**	**13**	**13**	**-**	**13**	**25.000.000**	**13**	**850.000.000**	**13**	**850.000.000**	**13**	**850.000.000**
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit	0	2	2	-	2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	0	1	1	-	1	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	0	2	2	-	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0	2	2	-	2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan	Unit	0	1	1	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	0	2	2	-	2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit						-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Laporan Penyediaan Jasa**	**Laporan**	**0**	**13**	**13**	**1.052.238.864**	**13**	**1.021.894.624**	**13**	**968.000.000**	**13**	**967.000.000**	**13**	**968.000.000**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	0	62	62	657.695.964	62	657.695.964	62	840.000.000	62	840.000.000	62	840.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	0	5	5	-	7	-	9	5.600.000	12	5.600.000	14	5.600.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	0	5	5	804.500.000	7	563.098.600	9	21.200.000	12	21.700.000	14	22.500.000
Pemeliharaan Barang MBR Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Laporan Pemeliharaan**	**Laporan**	**0**	**13**	**13**	**400.000.000**	**13**	**570.694.400**	**13**	**3.357.000.000**	**13**	**3.471.000.000**	**13**	**3.547.000.000**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	0	2	2	350.000.000	2	350.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	0	2	2	-	2	-	2	216.000.000	2	216.000.000	2	216.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	0	2	2	-	2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	0	1	1	90.000.000	1	124.864.400	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Pemeliharaan Jaat Tetap Lainnya	Jumlah asat tetap lainnya yang dipelihara	Unit	0	2	2	-	2	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pemeliharaan Jaat Tak Berwujud	Jumlah asat tak berwujud yang dipelihara	Unit	0	1	1	-	1	-	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	0	5	5	30.000.000	5	108.000.000	5	984.000.000	5	981.000.000	5	1.308.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	0	1	1	-	1	-	1	648.000.000	1	471.000.000	1	998.000.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	-	-	1	-	1	-	1	648.000.000	1	471.000.000	1	998.000.000
PROGRAM PELAYANAN DIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi induk dan cabang koperasi**	**Persen**	**22,79**	**22,79**	**26,81**	-	**5,22**	**50.000.000**	**5,22**	**215.000.000**	**6,44**	**125.000.000**	**9,66**	**250.000.000**
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Koperasi yang diterbitkan izin Usaha simpan pinjam**	**Koperasi**	**280**	**281**	**153**	**0**	**10**	**50.000.000**	**10**	**110.000.000**	**10**	**120.000.000**	**50**	**150.000.000**
Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	-	281	153	0	10	50.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	50	150.000.000

Kegiatan Pemeriksaan Ktn Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberikan ktn pembukaan kantor cabang	Koperasi			0	0	20	0	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000
Sub Kegiatan Pemeriksaan Ktn usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.	Unit Usaha	-	-	0	0	20	-	20	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan akuntabilitas, kekuatan, kesehatan, kemandirian koperasi	Persen	-	38,34	57,41	33.417.800	31,26	121.000.000	19,97	210.000.000	19,97	210.000.000	19,97	240.000.000
Kegiatan Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah, kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata ketoa pertoporasian	Koperasi	-	475	713	33.417.800	351	120.000.000	248	210.000.000	248	215.000.000	248	240.000.000
Sub Kegiatan Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, kelanggukan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten atau kota.	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, kelanggukan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	-	308	498	2.114.800	125	80.000.000						
Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota.	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota kinerja	Unit Usaha	-	167	217	31.305.200	147	75.000.000						
Sub Kegiatan Pengusian Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Pengusian Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha							124	80.000.000	124	85.000.000	124	90.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha							124	100.000.000	124	100.000.000	124	100.000.000
PROGRAM PENGAWAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	Persen	-	14,09	38,12	177.161.000	20,13	569.996.000	4,43	450.000.000	4,85	550.000.000	5,25	650.000.000

Kegiatan Pendidikan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang sehapak keanggotaannya dalam (1) daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Koperasi	-	175	110	177.252.500	250	549.996.000	55	450.000.000	50	550.000.000	45	650.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan pemilaian kesehatan KSP/LSP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan pemilaian kesehatan	Unit Usaha	-	175	100	136.107.500	220	249.907.000	50	500.000.000	55	550.000.000	40	400.000.000
Sub Kegiatan Penghargaan kesehatan KSP/LSP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Unit Usaha	-	-	25	41.089.000	23	98.888.000						
Sub Kegiatan Pemilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah koperasi yang Diberikan Pemilaian Kesehatan	Unit Usaha							25	100.000.000	25	200.000.000	25	250.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	Persen	-	18,10	16,81	428.886.000	18,32	519.388.000	16,82	210.000.000	21,74	210.000.000	18,10	220.000.000
Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	-	200	210	428.885.000	240	519.388.000	240	210.000.000	270	210.000.000	300	220.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	-	200	210	428.885.000	240	519.388.000	240	210.000.000	270	210.000.000	300	220.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase yang diberi dukungan fasilitasi pemasaran	Persen	-	16,38	30,61	2.567.500	24,44	150.000.000	38,66	160.000.000	31,69	165.000.000	36,71	170.000.000
Kegiatan Pembantayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	Orang	-	108	158	2.567.500	306	150.000.000	356	160.000.000	496	165.000.000	496	170.000.000
Sub Kegiatan Pembantayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, pengrakan kelembagaan, pelatihan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan kewirausahaan	Orang	-	108	158	2.567.500	256	150.000.000						
Sub Kegiatan Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan tarif hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan tarif hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Keluarga	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-

Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standardisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha							596	160.000.000	409	145.000.000	456	170.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru	**Persen**	-	**37,43**	**8,03**	**433.348.800**	**26,74**	**585.999.800**	**27,32**	**924.000.000**	**32,43**	**960.000.000**	**98,25**	**980.000.000**
Kegiatan Pembiayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pembiayaan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit Usaha	-	11.804	2.880	433.348.800	8.433	585.999.800	9.610	825.000.000	10.269	960.000.000	12.200	980.000.000
Sub Kegiatan Pendukung potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standardisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Unit Usaha	-	9.654	2.043	200.000.000	4.000	125.000.000						
Sub Kegiatan Pembantuan mobilisi kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit Usaha	-	1.000	483	89.649.000	2.000	125.000.000	2.500	155.000.000	3.000	160.000.000	3.500	180.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perijinan	Unit Usaha	-	100	98	81.480.000	625	125.000.000	875	275.000.000	1.100	200.000.000	1.450	225.000.000
Sub Kegiatan Pembantuan kelembagaan potensi dan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit Usaha	-	450	50	38.968.000	860	88.888.800	1.780	105.000.000	2.080	105.000.000	3.030	105.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembantuan usaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pembantuan usaha mikro	Orang	-	900	75	23.648.800	1.100	80.000.000	1.400	160.000.000	1.700	165.000.000	2.000	170.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kepatuhan dan kopetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	80	25.000.000						
Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha							1.000	300.000.000	1.000	300.000.000	1.000	300.000.000

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang							50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Jumlah Usaha Kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran**	**Persen**	-	0,75	1,25	350.000.000	1,22	310.000.000	1,27	310.000.000	1,27	610.000.000	1,27	610.000.000
Kegiatan Pengembangan usaha mikro, dengan orientasi peningkatan nilai usaha menjadi usaha kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Unit Usaha	-	250	400	350.000.000	380	320.000.000	400	320.000.000	400	620.000.000	400	620.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, adm, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Unit Usaha	-	250	400	350.000.000	380	320.000.000						
Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha							360	270.000.000	360	320.000.000	360	320.000.000
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitasi Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha							40	50.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah**	**Persen**	-	**18,08**	**23,81**	**2.367.125.150**	**23,76**	**1.909.999.825**	**30,81**	**2.151.000.000**	**31,45**	**2.213.500.000**	**32,29**	**2.276.100.000**
- **Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	2	2.367.125.150	2	1.909.999.825	1	2.151.000.000	2	2.213.500.000	2	2.276.100.000
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Dokumen	-	1	2	69.000.000	5	360.000.000	1	199.000.000	1	163.500.000	1	168.000.000
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Pemasaran Pengembangan, Penyebaran dan Pemeliharaan Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan pemasaran, pengembangan penyebaran dan pemeliharaan industri	Dokumen	-	1	2	-	5	-	1	106.000.000	1	109.000.000	1	112.000.000
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	-	500	400	11.028.800	4	150.000.000	1	446.000.000	1	500.000.000	1	716.100.000

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Dokumen	-	160	100	[illegible]	3	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	3	[illegible]
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	-	4	4	[illegible]	3	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	3	[illegible]
- Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	-	1	1	-	3	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]
PROGRAM PENGEMBANGAN IDN USAHA INDUSTRI	**Pelaku usaha industri yang dibesar**	**Pelaku Usaha Industri**	-	275	275	[illegible]	285	[illegible]	295	[illegible]	305	[illegible]	315	[illegible]
- Kegiatan Penerbitan Idin Usaha Industri (IUI), Idin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Idin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Idin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pelaku usaha industri yang dibesar**	**Pelaku Usaha Industri**	-	275	275	[illegible]	285	[illegible]	295	[illegible]	305	[illegible]	315	[illegible]
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Tabena Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	-	9	9	97.087.400	9	[illegible]						
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	275	275	35.025.600	9	75.000.000						
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang menyusunan Renaversion Model Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen							1	[illegible]	1	[illegible]	1	[illegible]

Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen							1	50.000.000	1	54.000.000	1	96.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**Jumlah Pelaku IKM yang menyampaikan Informasi Industri**	**Pelaku IKM**	-	5	5	197.025.000	6	249.998.800	6	495.000.000	6	509.200.000	6	515.500.000
- **Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPRI Kemenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Informasi Industri**	**Dokumen**	-	5	5	197.025.000	6	249.998.800	6	495.000.000	6	509.200.000	6	515.500.000
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	-	4	4	153.934.825	5	48.999.250	1	106.000.000	1	109.000.000	1	112.200.000
- Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	-	1	2	43.084.475	5	148.999.800	1	183.000.000	1	191.100.000	1	199.500.000
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	-	5	5	-	5	48.999.750	1	106.000.000	1	109.000.000	1	112.000.000

Samarinda, Juli 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS
10